

# PENYELENGGARAAN DESA BINAAN/ DESA MITRA KERJA BERPARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI

Supriatna\*

## Abstract

The Public Service Institution of Islamic State University (UIN) Sunan Kalijaga on its movement has conducted various periodically and planned activities as part of the public service implementation to the society. One of those activities is a village's guidance program/ a work partnership village which in 2006 has turn out to be 20 locations in residency/city of Yogyakarta. This program has been started since UIN was still in the form of IAIN (Islamic Religion State Institute). The program has been effective for the society especially in the area of remote, underdeveloped, and poverty village. However, on realization of the program, there are some weaknesses, especially on the aspect of method, so that the society's empowerment has not been optimal. This condition is probably because there are still some influences of the IAIN era. With the change of IAIN status to be UIN with the integration-interconnection paradigm, it is supposed that the realization of village guidance could be adjusted with that new paradigm, and the existed weakness could be minimized. Furthermore, this writing would be focused on a discourse of village's guidance organization with integration-interconnection paradigm.

## I. Pendahuluan

Perguruan Tinggi bukanlah menara gading yang berada di awang-awang dan tersekat dari kehidupan masyarakat, melainkan bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena bagian dari masyarakat maka sudah selayaknya Perguruan Tinggi mempunyai kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara yang sedang

membangun di berbagai bidang. Harapan masyarakat, bangsa, dan negara terhadap Perguruan Tinggi pernah dikemukakan oleh Presiden RI pada tahun 1975 waktu memberi sambutan pada Dies Natalis ke XXV Universitas Indonesia, 15 Februari 1975, antara lain dikemukakan:

"Dengan ilmu pengetahuan kita dapat mempercepat usaha untuk membuat kehidupan ini lebih baik. Di samping itu Universitas memikul tanggung jawab untuk melahirkan tenaga-tenaga pemikir yang dengan pikirannya itu mampu menunjukkan jalan dan dapat menggerakkan masyarakat untuk membangun. Karena pada umumnya ilmu pengetahuan harus diabdikan kepada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, maka ukuran penting bagi berhasilnya panggilan tugas Universitas bukanlah semata-mata ditentukan banyaknya sarjana yang dihasilkan, tetapi terutama oleh besar kecilnya peranan dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan masyarakatnya. Karena itu pula di samping menghasilkan sarjana-sarjana yang memiliki ilmu pengetahuan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, yang berwatak dan memiliki ketinggian moral, yang cinta kepada kemanusiaan dan cinta kepada masyarakatnya, maka Universitas harus menghasilkan sarjana-sarjana yang benar-benar memahami arah, tujuan dan segala seluk beluk pembangunan yang dilakukan oleh bangsanya. Tanpa memahami arah, tujuan dan segala seluk beluk pembangunan akan sulit dan malahan mustahil Universitas dan para sarjana yang dihasilkannya akan dapat memberikan darma bakti yang berguna kepada bangsanya yang sedang membangun".<sup>1</sup>

Sekalipun sambutan tersebut disampaikan 32 tahun yang lalu, tetapi isi dan semangatnya sampai sekarang masih tetap relevan dan menjadi bagian dari penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Yaitu penegasan bagaimana keberadaan dan tugas Universitas (Perguruan Tinggi) di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan figur sarjana yang diharapkan oleh bangsa Indonesia yang sedang membangun.

Dengan dilaksanakannya darma pengabdian kepada masyarakat di samping dua darma yang lain yaitu pendidikan dan penelitian, diharapkan selalu ada keterkaitan bahkan kemanunggalan antara Perguruan Tinggi dan masyarakat. Dengan demikian ada usaha untuk mencegah adanya isolasi Perguruan Tinggi dari masyarakat lingkungannya. Oleh karena pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi atau tugas pokok dari Perguruan Tinggi maka pelaksanaannya perlu dilakukan dan

---

<sup>1</sup>Sambutan Presiden RI pada Dies Natalis ke XXV Universitas Indonesia, 15 Februari 1975, dikutip dari Gatot Murdjito, "Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan", *Makalah* disampaikan pada Pembekalan Program Pembangunan Daerah Bagi Dosen Pembimbing Lapangan KKN, diadakan oleh Biro Bina Sosial Setwilda Propinsi DIY, 18 - 19 Juli 1996.

didukung oleh segenap warga Perguruan Tinggi dengan pengertian yang cukup tentang konsep pengabdian kepada masyarakat dan metoda pelaksanaannya.<sup>2</sup> Perguruan Tinggi dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang dimilikinya dapat membantu memecahkan berbagai problem yang dihadapi masyarakat dan melahirkan berbagai gagasan. Melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, (IPTEKS) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat para dosen dan mahasiswa dapat berkontribusi secara ilmiah untuk kemajuan bangsa.

Sebagai Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Agama Negeri tertua di Indonesia, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sebelumnya bernama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah sejak lama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dan kegiatan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah dilaksanakan sejak tahun akademik 1976/1977, sekalipun waktu itu masih bersifat ekstra-kurikuler.<sup>3</sup> Pada tanggal 1 Mei 1979 dengan terbitnya SK Rektor IAIN Sunan Kalijaga Nomor 11 Tahun 1979, tanggal 19 April 1979, didirikan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM). Pada waktu itu lembaga ini membawahi 7 (tujuh) seksi: Dakwah, Pendidikan Islam, Seni Budaya Islam, Ru'yat dan Hisab, Penerbitan, Penterjemahan, dan Hukum Islam.<sup>4</sup> Dengan didirikannya Lembaga Pengabdian pada Masyarakat menunjukkan kesungguhan IAIN Sunan Kalijaga untuk menangani pengabdian kepada masyarakat supaya lebih teroganisir, terlembaga, dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.<sup>5</sup> Sampai sekarang komitmen UIN Sunan Kalijaga mengenai pengabdian masyarakat masih

---

<sup>2</sup>Margono Slamet, "Arti dan Metoda Pengabdian pada Masyarakat dan Bentuk-Bentuk Pelaksanaannya oleh Perguruan Tinggi", dalam Agussalim Sitompul (ed.), *Metodologi Pengabdian pada Masyarakat* (Yogyakarta: Balai Pengabdian pada Masyarakat P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1993), p. 33.

<sup>3</sup>Sampai tahun akademik 1979/1980 status KKN di IAIN Sunan Kalijaga masih bersifat ekstra kurikuler dan pada 1980 dirubah menjadi intrakurikuler wajib diikuti oleh semua mahasiswa S1. Perubahan status ini berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor 51 tahun 1980, tanggal 24 Desember 1980. Supriatna (ed.), *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Panitia Pelaksana KKN, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, 2005), p. 3.

<sup>4</sup>Taufiq A. Dardiri dan Zainal Abidin, 2006, "Menata Ulang Paradigma Pengabdian kepada Masyarakat, Refleksi Perubahan PPM Menjadi LPM UIN Sunan Kalijaga", *Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. VII No. 1, Juni 2006, p. 5.

<sup>5</sup>LPM didirikan pada 1 Mei 1979 (kemudian dikenal dengan periode 70-an akhir). Pada

tetap terjaga dan ragam kegiatan yang dilakukan secara berkala dan terencana melalui unit organisasi LPM semakin berkembang. LPM dalam tahun 2002-2006 telah melakukan serangkaian program pengabdian kepada masyarakat pedesaan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah berupa (1) pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengiriman tenaga juru dakwah, (2) Pelatihan Imam, Khatib/Da'i, Ta'mir Mesjid, dan Perawatan Jenazah; (3) Penerbitan buku khutbah Idul Fitri dan Idul Adha; (4) Desa Binaan; (5) Kuliah Kerja Nyata (KKN); (6) Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen; (7) Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); (8) Dialog Pemuda; (9) Kerjasama dengan berbagai lembaga; dan (10) Pembinaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS).<sup>6</sup>

Berbagai kegiatan di atas telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari program desa binaan/desa mitra kerja dapat dikemukakan beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk membantu warga masyarakat, antara lain: di lokasi binaan yang pada awalnya tidak ada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), sekarang sudah berdiri TPA dengan bimbingan ustadz/ustadzah hasil binaan para penyuluh. Warga masyarakat yang semula belum bisa melaksanakan shalat, sekarang sudah aktif ke masjid mengikuti shalat jama'ah. Mushalla dan masjid yang semula rusak, sudah bisa berhasil direhab, bahkan ada beberapa mushalla/masjid yang baru bisa didirikan setelah program desa binaan dari IAIN/UIIN masuk ke lokasi tersebut. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ke beberapa lokasi binaan telah disalurkan berbagai alat pertukangan dan industri kecil yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian juga telah dibantu beberapa hewan ternak untuk *digaduh* kemudian digulirkan kepada yang lain di bawah koordinasi takmir masjid atau pengurus RT.

Beberapa program kegiatan di atas dan metode pelaksanaannya masih berupa warisan ketika UIIN masih sebagai institut (IAIN) yang pada waktu itu terfokus mengkaji berbagai ilmu keagamaan Islam dan kurang

---

era yang dikenal dengan era sebelum periode akhir 70-an akhir, kegiatan pengabdian dikoordinasi oleh lembaga tertentu secara terpisah menurut bidang garap pengabdian masing-masing. Pada era sebelumnya lagi, dikenal dengan periode sebelum 70an akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat ditangani oleh civitas akademika IAIN secara individual dan insidental. Pertimbangan utama adalah berdakwah dan beramal. Ahmad Patiroy, "Orientasi Pengabdian LPM dalam Bingkai Paradigma Interkoneksi UIN", *Laporan Penelitian* (Yogyakarta: Lemlit UIIN Sunan Kalijaga, 2006), p. 21.

<sup>6</sup>Amin Abdullah, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: UIIN Sunan Kalijaga, 2006), p. 167-191.

bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Harus diakui bahwa sampai sekarang LPM UIN Sunan Kalijaga belum 'membakukan' metode ilmiah dalam pelaksanaan Desa Binaan. Hal itu sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan para penyuluh. Terhadap program pengabdian yang dilaksanakan LPM, beberapa pihak menilai bahwa apa yang dilakukan LPM UIN Sunan Kalijaga sekarang ini masih belum banyak berubah. Orientasi pengabdian masih bersifat klasik, monoton, dan kurang *applicable*, sehingga kurang memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Titik lemah yang paling mendasar adalah berkaitan dengan metode pelaksanaannya.<sup>7</sup> Kiprah pengabdian LPM selama ini cenderung lebih menekankan pada orientasi pembinaan keagamaan dibanding penanganan masalah sosial-ekonomi yang justru lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan hidup mereka<sup>8</sup> Selain itu, orientasi pengabdian LPM juga cenderung masih terlalu sentralistik, yaitu berorientasi dari atas ke bawah (*top down*), sehingga hampir menafikan potensi lokal yang bisa jadi justru lebih *reliable* untuk diterapkan dalam memecahkan berbagai problem sosial-keagamaan di daerah pengabdian. Orientasi pengabdian semacam ini, tentu saja, telah kehilangan relevansi oleh karena kecenderungannya yang berat sebelah dan bersifat dikotomis. Arah pengabdian yang berorientasi dari bawah ke atas (*bottom up*) sudah saatnya mendapatkan prioritas yang lebih besar. Kendala lain yang mengakibatkan masyarakat di lokasi binaan kurang terberdayakan karena selama ini program yang dilakukan cenderung lebih bersifat *etik*, suatu kegiatan yang menekankan dari perspektif pemberi program. Oleh karena didasarkan pada perspektif pemberi program, maka seringkali program-program yang ditawarkan kepada masyarakat hanya efektif pada saat pemberi program berada di lapangan. Program-program itu, selanjutnya, akan sirna ditelan waktu bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan program tersebut. Sementara kondisi obyektif yang terdapat dalam internal masyarakat kurang mendapat perhatian.<sup>9</sup> Semestinya karena program pengabdian dilakukan untuk memberdayakan masyarakat maka harus

---

<sup>7</sup>Beberapa lontaran yang dianggap titik lemah pelaksanaan pengabdian LPM dikemukakan oleh Ahmad Patiroy yang pada tahun 2006 melakukan penelitian terhadap orientasi pengabdian LPM seperti disebutkan dalam catatan kaki nomor 5 di atas.

<sup>8</sup>Atho Mudzhar, "Kedudukan IAIN sebagai Perguruan Tinggi" dalam Komarudin Hidayat, *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam* (Jakarta :Ditperta Departemen Agama, 2000), p. 69.

<sup>9</sup>Ahmad Patiroy, "Orientasi Pengabdian LPM.....", p. 17.

dilihat dari perspektif masyarakat yang diberi program, yakni bersifat *emik*.<sup>10</sup> Kegiatan demikian lebih dapat mengakomodir permasalahan krusial yang betul-betul dihadapi masyarakat dan mencarikan solusi jalan keluarnya.

Mencermati beberapa pandangan di atas menarik untuk melihat kembali program pengabdian masyarakat LPM dan metode pelaksanaannya, terutama setelah berubahnya status IAIN dari institut menjadi univertitas (UIN), yang mengusung paradigma integratif-interkonektif, yang ingin menghilangkan sekat dikotomis antara ilmu keagamaan dengan ilmu pengetahuan umum. Namun demikian dari beberapa kegiatan program pengabdian LPM di atas dalam tulisan ini hanya difokuskan kepada satu kegiatan yaitu Desa Binaan/Desa Mitra Kerja, dengan pertimbangan: *pertama* jumlah lokasi desa binaan terus mengalami peningkatan dengan anggaran yang cukup besar. Pada akhir tahun 1990an ketika program ini digulirkan, hanya ada satu lokasi, tetapi pada tahun 2000an jumlah lokasi mengalami peningkatan. Tahun 2006 LPM UIN Sunan Kalijaga mempunyai 20 lokasi desa binaan/desa mitra kerja yang tersebar di lima wilayah Kabupaten/Kota se Propinsi DIY. *Kedua*, program ini berjalan secara berlanjut, satu lokasi bisa dijadikan desa binaan sampai lima tahun secara terus menerus, sehingga hasilnya bisa diamati secara jelas. *Ketiga*, pada masing-masing lokasi desa binaan ditetapkan dua orang penyuluh. Semua penyuluh adalah dosen IAIN/UIN sehingga dalam melaksanakan tugas penyuluhannya masuk dalam kriteria pengamalan ilmu secara langsung kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran. Apakah penunjukkan dosen penyuluh yang mayoritas berlatarbelakang keilmuan keagamaan, sudah tepat dalam pelaksanaan desa binaan?

Berdasarkan permasalahan dan pertimbangan di atas, maka permasalahan utama yang ingin dikedepankan dalam tulisan ini bagaimana pelaksanaan desa binaan/desa mitra Kerja LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam konteks paradigma integratif-interkonektif.

---

<sup>10</sup>Perspektif *etik* menggunakan cara-cara pelukisan yang secara universal dipakai dalam dunia antropologi sementara perspektif *emik* menggunakan cara-cara pelukisan menurut pandangan atau makna yang diberikan oleh masyarakat pendukung kebudayaan. Heddy Shri Ahimsa Putra, 1986, "Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan", *Masyarakat Indonesia* XII (2)

## II. Perubahan Kelembagaan dan Pola Pengabdian LPM: Landasan Akademik dan Yuridis

Transformasi IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga memiliki implikasi dalam aspek akademik dan kelembagaan secara simultan dan bersamaan. Dalam aspek akademik, UIN Sunan Kalijaga telah mendapatkan ijin penyelenggaraan program studi umum di luar ilmu-ilmu keislaman. Dengan demikian, UIN Sunan Kalijaga memiliki kesempatan untuk melaksanakan misinya dalam mengembangkan kajian-kajian interdisipliner dan multidisipliner dengan pendekatan integratif-interkonektif demi meretas dikotomi antara sains dan agama, ilmu agama dan ilmu umum, sakral dan profan.<sup>11</sup>

Pada tataran konsep, paradigma integratif-interkonektif dapat dipahami dari penjelasan Amin Abdullah<sup>12</sup> yang menyatakan bahwa paradigma keilmuan interkonektif-integratif merupakan bangunan keilmuan universal yang tidak memisahkan antara wilayah agama dan ilmu. Dalam bangunan keilmuan ini, ilmu pengetahuan agama (Islam) tidak lagi terpisah secara dikotomis dengan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam format keilmuan UIN yang baru, orientasi ilmu pengetahuan yang ingin ditekankan merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu *qauliyah/hadharah an-nash* (ilmu yang berkaitan dengan teks kegamaan) dengan ilmu-ilmu *kauniyah ijtimai'iyah/hadharah al-'ilm* (ilmu kealaman dan kemasyarakatan) dan ilmu *hadharah al-falsafah* (ilmu etika kefilosofan).

Paradigma integratif-interkonektif dalam implementasinya masih terus dikembangkan. Operasionalisasi paradigma ini telah dimulai dari pembuatan petunjuk teknis bagaimana menginterkoneksi dan mengintegrasikan satuan mata kuliah ke dalam suatu bentuk silabi dan kurikulum. Petunjuk teknis ini pun masih mungkin diperdebatkan, karena modus interkoneksi yang ditekankan lebih mengarah pada aspek materi pembelajaran, sementara aspek metodologi sebagai suatu perspektif studi yang merupakan sifat dasar terpenting sebuah ilmu cenderung belum menunjukkan kejelasan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Amin Abdullah, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga.....*, p. 29

<sup>12</sup>Amin Abdullah, "Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Arah Integratif-interdisipliner". *Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Panel Refleksi 21 Tahun Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 16 Maret 2004*. Juga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum*. (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2004), p. 5.

<sup>13</sup>Supriatna, dkk., *Laporan Penelitian Paradigma Interkoneksi dalam Penelitian Hukum Islam*,

Walaupun paradigma integratif-interkoneksi dalam implementasinya masih terus dikembangkan dan cara pelaksanaan yang simultan masih terus dicari, akan tetapi karena sudah digulirkan dan dalam beberapa hal sudah dilakukan, maka bagaimana dampaknya kepada LPM, karena seperti sudah disinggung di atas bahwa transformasi IAIN menjadi UIN memiliki implikasi dalam aspek akademik dan kelembagaan secara simultan dan bersamaan. Bagi LPM implikasi tersebut berkaitan dengan kelembagaan maupun terhadap pola pengabdian kepada masyarakat, khususnya pelaksanaan program Desa Binaan/ Desa Mitra Kerja yang menjadi kajian dalam tulisan ini.

Untuk mendukung perubahan IAIN menjadi UIN, melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 390 Tahun 2004, tanggal 13 September 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kelembagaan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) IAIN Sunan Kalijaga ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM). Dengan demikian perubahan dalam bidang kelembagaan di tubuh LPM sudah terlampaui. Perubahan di bidang kelembagaan telah pula diikuti dengan ditetapkannya visi dan misi LPM yang baru yang mestinya diikuti pula dengan perubahan di bidang kinerja.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 390 Tahun 2004 disebutkan bahwa Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi UIN Sunan Kalijaga di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor. Tugas LPM disebutkan dalam Pasal 40: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Pasal 41 mengatur tentang tugas LPM, dalam pasal ini disebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, LPM berwenang menyelenggarakan fungsi (a). Perumusan kebijakan di bidang pengabdian kepada masyarakat; (b) pengamalan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah; (c) peningkatan relevansi program UIN Sunan Kalijaga sesuai kebutuhan masyarakat; (d) pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; dan (e) pelaksanaan administrasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

---

*Redesain Terhadap Metodologi Penelitian dalam Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, 2006), p. 9*



Untuk mendukung kinerja pengabdian kepada masyarakat, LPM telah melakukan serangkaian reorganisasi, yaitu dengan diterbitkannya SK Rektor UIN Sunan Kalijaga No. 170/Ba.0/A/2005, tanggal 12 Mei 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga. Pada Lampiran SK Rektor tersebut dicantumkan adanya organ baru yang berada di bawah koordinasi LPM, yaitu Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Pusat Pengembangan Mahasiswa dan Kerjasama (PPK). Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dengan ruang lingkup kegiatan: Desa Binaan/Desa Mitra Kerja, Pelayanan kepada Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihan kepada Masyarakat, dan Pembinaan Masyarakat Pantai. Adapun Pusat Pengembangan Mahasiswa dan Kerjasama (PPK), dengan ruang lingkup kegiatan: Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengembangan SDM/Kewirausahaan, Pengembangan Media/ Penerbitan, dan Penerapan Hasil-hasil Penelitian/Teknologi Tepat Guna.<sup>14</sup>

Bidang-bidang kegiatan di atas yang berada di bawah Pusat Pemberdayaan Masyarakat maupun Pusat Pengembangan Mahasiswa dan Kerjasama sebagiannya adalah kegiatan baru yang pada waktu LPM berstatus PPM belum ada. Bidang kegiatan LPM di atas sudah cukup banyak dan bervariasi dan hampir semua kegiatan tersebut bersentuhan dengan masyarakat. Persoalannya apakah LPM bisa mengaplikasikan semua kegiatan di atas? Pertanyaan ini muncul karena menyangkut dua hal: *pertama*, SDM (Sumber Daya Manusia) yang akan menanganinya, yang mungkin belum tersedia seluruhnya di UIN. Apabila kapabilitas SDM itu dilihat dari keilmuannya dan untuk memudahkan dengan melihat kepada Jurusan/Prodi yang ada sebagai tolok ukurnya, maka jurusan/prodi yang ada di UIN, termasuk sepuluh (10) prodi yang baru didirikan, maka belum mencukupi untuk dapat menangani semua kegiatan di atas. *Kedua*, menyangkut finansial, karena untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut diperlukan dana yang memadai. Apabila semua dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibebankan kepada anggaran pemerintah, tampaknya cukup berat. Oleh karena itu LPM harus banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten sesuai bidang kegiatan, maupun dalam memenuhi kebutuhan finansial dan ini bukan pekerjaan ringan.

Adapun perubahan di bidang metode pengabdian, sampai saat ini belum dilakukan. Untuk itu LPM sudah saatnya mereaktualisasi dan me-

---

<sup>14</sup>Taufik A. Dardiri dan Zainal Abidin, "Menata Ulang Paradigma Pengabdian.....", p. 6-8.

revitalisasi metode pengabdian masyarakat, termasuk metode pelaksanaan Desa Binaan. Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 390 Tahun 2004 yang disebutkan di atas, sama sekali tidak disinggung mengenai metode pelaksanaan kegiatan LPM.

Seperti sudah disebutkan di atas bahwa sampai saat ini LPM belum mempunyai metode baku dalam pelaksanaan desa binaan, sehingga setiap penyuluh dalam melaksanakan tugasnya mulai dari perencanaan program sampai kepada pelaksanaannya dilakukan atas kemampuannya sendiri-sendiri. Sekalipun kegiatan desa binaan ini sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, akan tetapi metode pelaksanaannya masih mengandung kelemahan. Untuk inovasi ke depan, sesuai dengan format keilmuan di UIN, Ahmad Patiroy mengusulkan untuk menggunakan metode pengabdian integratif yang memadukan antara konsep pengabdian dengan kebutuhan aktual masyarakat melalui proses pengkajian atau penelitian. Metode pengabdian integratif ini dikenal dengan istilah *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut berperanserta dalam meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga tahap evaluasi. Metode ini merupakan pengembangan dari tehnik pengkajian masyarakat yang diperkenalkan sebelumnya dengan sebutan *Participation Action Research* (PAR), yaitu sebuah pendekatan atau metode pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui penguatan dan penyadaran diri masyarakat dalam melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka.

Menurut pandangan Ahmad patiroy, penerapan metode ini lebih memungkinkan masyarakat sasaran pengabdian diberdayakan melalui sejumlah program atas dasar kebutuhan dan potensi yang dimiliki, bukan atas kehendak pemberi program. Demikian pula, melalui metode ini kesadaran kritis masyarakat yang diberi program dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri dan memecahkan problem sosial yang dihadapi.<sup>15</sup>

Adapun langkah atau tahapan implementasi dari metode PRA dalam pengembangan masyarakat mengikuti program yang terdiri dari identifikasi masalah dan kebutuhan, pencarian alternatif kegiatan, pemilihan alternatif

---

<sup>15</sup>Ahmad Patiroy, "Orientasi Pengabdian LPM....", p. 55-66.

kegiatan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi program. Secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1. Penjajagan dan Pengenalan Kebutuhan

Penjajagan dan pengenalan kebutuhan seringkali disebut dengan pengenalan masalah, karena biasanya masyarakat memiliki masalah yang menimbulkan kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk mengatasi masalah yang mengganggu kesejahteraan hidup mereka. Pengkajian masalah ini disertai dengan pengenalan potensi masyarakat, terutama bila program yang dikembangkan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan keswadayaan masyarakat. Pada tahap awal ini yang dikaji adalah data atau informasi yang mengungkapkan keberadaan lingkungan keadaan desa secara umum. Pengkajian keadaan desa itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji mengapa masalah-masalah yang dirasakan mengganggu kesejahteraan hidup mereka terjadi serta bagaimana mengatasi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Pengkajian ini dilakukan untuk penyusunan rencana kerja pada tahapan berikutnya. Melalui kajian identifikasi ini diharapkan dapat menimbulkan proses belajar dan kesadaran terhadap berbagai permasalahan keadaan kehidupan dan lingkungan yang dihadapi untuk kemudian menjadi semacam perenungan dalam pencarian jalan keluar untuk mengatasinya. Lebih dari itu, kajian identifikasi ini diharapkan agar program yang direncanakan dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, oleh karena menjadi bagian dari kebutuhan mereka.

## 2. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan dilakukan untuk menyusun kegiatan berdasarkan masalah, kebutuhan, dan potensi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengkajian desa. Rencana kegiatan yang disusun itu sedapat mungkin bersifat sederhana, jelas, wajar, dan benar-benar dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan dukungan dari lembaga pendamping atau lembaga mitra. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan berdasarkan hasil keputusan masyarakat sendiri melalui forum diskusi. Diskusi ini sebaiknya dihadiri oleh berbagai kelompok masyarakat yang cukup mewakili kepentingan umum. Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan secara bersama ini diharapkan akan menimbulkan perasaan kebersamaan dan tanggungjawab bersama. Dalam penyusunan rencana kegiatan ini, selain membicarakan alternatif jenis kegiatan, juga harus menentukan waktu, lokasi, pelaksana kegiatan, dan pemilihan tehnik PRA.

### 3. Pelaksanaan atau Pengorganisasian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan perlu diorganisir sesuai dengan pengaturan jadwal kegiatan, termasuk pembagian kelompok dan tugas-tugas. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya diorganisir dan dipimpin oleh anggota masyarakat sendiri, sementara petugas program hanya berlaku sebagai pendamping.

### 4. Pemantauan Kegiatan/Monitoring

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan perlu dipantau atau diawasi secara berlanjut untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Jika menyimpang tentu perlu diusahakan tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh masyarakat. Pemantauan ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan dan hasilnya dituliskan dalam bentuk laporan kemajuan (*progress report*).

### 5. Evaluasi Kegiatan

Setelah satu tahapan kerja selesai dilaksanakan, hasilnya layak dievaluasi atau dinilai menurut kesepakatan penilaian bersama masyarakat. Petugas program cukup mendampingi saja dalam proses evaluasi tersebut. Evaluasi biasanya dilakukan dua kali, yaitu evaluasi jangka tertentu (pertahun) dan evaluasi akhir program. Evaluasi dalam jangka waktu tertentu itu dilakukan untuk menilai arah dan kemajuan program, efisiensi dan efektifitas pekerjaan, dan berbagai kendala yang ditemui. Sementara evaluasi akhir program dilakukan untuk menilai hasil yang telah dicapai selama pengembangan program jangka waktu tertentu untuk kemudian disusun menjadi laporan akhir program.<sup>16</sup>

Dalam pada itu, selain dapat memberdayakan masyarakat, metode pelaksanaan Desa Binaan yang digunakan LPM idealnya adalah metode yang dapat memberikan kontribusi sebagai umpan balik keilmuan yang dapat diperoleh UIN. Umpan balik keilmuan dimaksud adalah sejauh mana kegiatan pengabdian yang dilakukan itu dapat memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan bidang pengajaran (kurikulum) di UIN. Dari umpan balik ini akan memperkaya jurusan/prodi dalam merevisi kurikulum atau silabi dan mendalaminya di ruang kuliah.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, p. 69-75

### III. Pelaksanaan Desa Binaan dengan Paradigma Integratif-Interkonektif

Walaupun pembangunan nasional sudah dilaksanakan sejak lama akan tetapi sindrom kemiskinan masih menghimpit sebagian masyarakat Indonesia. Jumlah orang yang tergolong miskin dalam realitas kekinian jumlahnya masih banyak, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Umumnya mereka berada di daerah pedesaan atau pinggiran. Selain kemiskinan, problem sosial yang melilit mereka adalah kebodohan dan keteringgalan. Masalah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Untuk membantu warga masyarakat yang terkena berbagai sindrom di atas, LPM UIN Sunan Kalijaga sudah lama mengadakan program Desa Binaan/Desa Mitra Kerja. Secara terminologi yang dimaksud dengan Desa Binaan, adalah seperti dirumuskan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia dalam *Pedoman Pelaksanaan Desa Binaan IAIN/STAIN*, Bab II disebutkan : "yang dimaksud dengan desa binaan atau desa mitra kerja di dalam pedoman ini ialah desa atau wilayah yang secara khusus dipilih dan ditetapkan oleh IAIN/STAIN (dalam konteks ini berarti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) sebagai lokasi pelaksanaan program peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan secara berencana, kontinyu, dan terpadu".

Berencana, dalam arti "kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa binaan/desa mitra kerja didasarkan kepada program yang disusun secara matang melalui proses penelitian, penelaahan, dan pengkajian yang mendalam". Kontinyu, dalam arti "kegiatan pembinaan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan dan tanpa henti selama kurun waktu masa pembinaan yang diprogramkan". Adapun terpadu, dalam arti, "kegiatan dilaksanakan dalam satu kesatuan program yang saling berkait menunjang antara bidang garapan dan antar pihak terkait".<sup>17</sup>

Pada tahun 2006 jumlah lokasi Desa Binaan UIN Sunan Kalijaga mencapai 20 lokasi/desa pra sakinah yang tersebar di seluruh daerah kabupaten/kota di wilayah Prop. DIY. Untuk setiap lokasi Desa Binaan, diangkat dua orang penyuluh yang bertugas melakukan pembinaan di lokasi. Semua penyuluh

---

<sup>17</sup>Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Desa Binaan IAIN/STAIN* (Jakarta: Depag RI, 1998/1999), p. 2-3.

adalah dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, mengajar di berbagai jurusan/prodi dan mayoritas berlatar pendidikan ilmu keagamaan.

Program Desa Binaan diorientasikan pada pembinaan kehidupan beragama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembinaan sosial budaya. Di bidang keagamaan, program Desa Binaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan agama, pelatihan qira'ah, pelatihan perawatan jenazah, pelatihan guru/ustadz/ustadzah TPA, pelatihan khatib, pelatihan keluarga sakinah, dll.

Untuk pemberdayaan ekonomi, program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan kewirausahaan, penambahan modal simpan pinjam, pengadaan mesin jahit, obras, penggilingan tepung beras, pemberian bantuan ternak kambing, dll.

Di bidang sosial budaya dan fisik, kegiatannya dalam bentuk penyuluhan kesehatan dan gizi, penambahan koleksi perpustakaan, pelatihan seni rebana, pemasangan konblok/penataan jalan, pembangunan dan renovasi masjid/mushalla, pengadaan sarana pertukangan, dll.<sup>18</sup>

Untuk melihat lebih jauh bagaimana para penyuluh melaksanakan kegiatannya dalam pelaksanaan Desa Binaan, penyusun meminjam metode PRA dan tahap-tahap pelaksanaannya seperti diusulkan Ahmad Patiroy dengan memberi beberapa catatan tambahan di sana-sini dalam konteks Desa Binaan versi UIN Sunan Kalijaga sebagai upaya pengembangan lebih lanjut secara interkoneksi.

Esensi dari metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu upaya memberdayakan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sejak tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasinya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sedangkan pihak luar/petugas program hanya sebagai pendamping. Dengan demikian dalam setiap tahapan selalu melibatkan warga masyarakat sebanyak mungkin.

Dilihat dari langkah-langkah atau tahapan PRA sebenarnya tidak berbeda dengan tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat seperti yang diatur oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DP3M) Diknas yang selama ini dipedomani oleh perguruan tinggi umum dalam melakukan pengabdian, termasuk dalam pelaksanaan Pengembangan Wilayah Terpadu/Desa Mitra Kerja,<sup>19</sup> dan dalam beberapa

---

<sup>18</sup>Amin Abdullah, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN.....*, p. 179-180.

<sup>19</sup>Bandingkan dengan Syafri Mangkupawira, "Metode Analisis dan Pemecahan Masalah Masyarakat", Margono Slamet, "Arti dan Metoda Pengabdian pada Masyarakat dan Bentuk-Bentuk Pelaksanaannya Oleh Perguruan Tinggi", dalam Agussalim Sitompul, *Metodologi Pengabdian pada Masyarakat*, p. 9-47.

hal sudah dilakukan juga oleh para penyuluh Desa Binaan UIN. Hanya saja harus diakui bahwa *melibatkan masyarakat sebanyak mungkin*, sejak dari perumusan masalah sampai evaluasinya, memang belum banyak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan banyak faktor: waktu, tenaga, termasuk dana. Demikian juga bahwa pihak pendamping (dalam hal ini penyuluh) hanya semata-mata sebagai pendamping, tidak bisa diterima sepenuhnya, karena dalam hal ini harus ada aspek *pengamalan ilmu* yang dilakukan oleh para penyuluh. Dari sisi lain justru kedatangan para penyuluh adalah ikut memecahkan masalah sesuai dengan disiplin ilmunya dari serangkaian program yang telah dirancang oleh masyarakat dan penyuluh. Tidak semua masalah, masyarakat bisa memecahkannya secara sendirian, perlu bantuan pihak lain. Bahwa dalam memecahkan masalah tersebut masyarakat dilibatkan itu persoalan lain dan memang seharusnya.

Dari tahapan kegiatan Desa Binaan yang dituntunkan oleh metode PRA maupun lainnya, kegiatan yang pertama dilakukan ialah penjajagan dan pengenalan kebutuhan atau pengenalan masalah. Di samping untuk mengumpulkan data lokasi juga untuk menjaring sebanyak mungkin permasalahan yang ada di lokasi. Pengkajian masalah ini idealnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini ada dua hal yang penyusun beri catatan. *Pertama*, tidak semua orang atau masyarakat paham mengenai masalah yang mereka hadapi, tetapi orang luar bisa melihatnya. Di sinilah peran pendamping/ penyuluh untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa sesuatu itu masalah bagi mereka. Sebagai contoh, mushalla/masjid belum difungsikan sebagai tempat shalat fardlu secara berjama'ah. Bagi masyarakat hal tersebut mungkin tidak masalah, tetapi dari norma agama merupakan masalah. Contoh lain mengenai kesadaran pendidikan, bahwa pada sekelompok masyarakat, pendidikan anak-anak mereka dipandang cukup apabila sudah menyelesaikan sekolah dasar (SD). Anak mereka tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (SLTP), bagi mereka bukan masalah, mungkin karena keadaan mereka yang kurang mampu di bidang ekonomi. *Kedua*, seperti disebutkan di atas bahwa permasalahan ini diangkat dari masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Dalam prakteknya tidak semudah yang dibayangkan, karena mengumpulkan masyarakat sebanyak mungkin tidak mudah, lebih-lebih kalau harus dilakukan berkali-kali. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Desa Binaan UIN, untuk kegiatan ini para penyuluh hanya mendatangi tokoh-tokoh masyarakat dan melakukan wawancara, menggali permasalahan yang ada pada masyarakat mereka. Hasilnya diklaim sebagai permasalahan masyarakat secara

keseluruhan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, permasalahan bisa dikumpulkan oleh petugas melalui wawancara kepada banyak masyarakat dengan mendatangi rumah-rumah mereka atau tempat mereka bekerja. Dengan demikian diperlukan tenaga dan waktu yang cukup, tidak memadai hanya dilakukan oleh dua orang penyuluh dan dalam waktu yang relatif terbatas. Kesulitan ini bisa diatasi dengan melibatkan mahasiswa KKN, artinya di tempat yang ditunjuk menjadi lokasi Desa Binaan sekaligus dijadikan lokasi KKN. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dikelompokkan ke dalam bidang-bidang masalah kemudian dikembalikan lagi kepada mereka untuk dikaji lebih lanjut. Begitu seterusnya sampai betul-betul ditemukan apa yang menjadi permasalahan sesungguhnya bagi masyarakat.

Langkah berikutnya adalah *perencanaan kegiatan*. Dalam tahap ini pun masyarakat yang melakukan perumusannya dan disusun sesuai dengan prioritasnya. Dalam tahap ini penyusun memberi catatan, bahwa dalam menetapkan prioritas permasalahan harus melihat kepada SDM yang ada di UIN. Apabila tidak, masalah hanya tetap menjadi masalah tanpa penyelesaian, karena tidak ada tenaga ahlinya yang akan ditunjuk menjadi penyuluh. Perlu mendapat perhatian pula, sekalipun IAIN sudah menjadi universitas, akan tetapi tugas pokok dan fungsi UIN Sunan Kalijaga tetap sebagai lembaga pendidikan tinggi bidang Agama Islam, dengan artian bidang studi ilmu-ilmu keislaman (*Islamic studies*) tetap menjadi *core study*-nya.<sup>20</sup> Oleh karena kegiatan keagamaan harus tetap menjadi bagian dari perencanaan kegiatan bersama dengan kegiatan lain di luar bidang keagamaan.

Berkaitan dengan perencanaan kegiatan yang diuraikan di atas, LPM UIN Sunan Kalijaga perlu melakukan pengkajian ulang berkaitan dengan program Desa Binaan ini. Penyuluh yang ditunjuk di suatu lokasi, tidak cukup hanya dua orang dan kesemuanya berlatar pendidikan keagamaan, tetapi jumlah dan keahliannya harus disesuaikan dengan rencana kegiatan dan bidang masalah yang akan menjadi garapan. Oleh karena para penyuluh ini adalah dosen yang ada di fakultas/jurusan/prodi, maka semua fakultas harus merencanakan dan menganggarkan program pengabdian kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LPM. Pada waktu LPM membutuhkan tenaga penyuluh yang sesuai dengan bidang keahliannya, fakultas harus mendukung bahkan

---

<sup>20</sup>Amin Abdullah, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN.....*, p. 30.



memfasilitasinya. Inilah salah satu aplikasi dari pengabdian yang berparadigma interkoneksi, kegiatan keagamaan dilaksanakan bersama-sama dengan kegiatan non keagamaan dengan melibatkan tenaga penyuluh yang sesuai dengan bidang masalah dan mencerminkan keahliannya. Apabila di UIN tidak ada tenaga yang sesuai dengan masalah yang diprogramkan maka LPM harus memfasilitasinya dengan mencari tenaga penyuluh dari luar, baik dari lingkungan perguruan tinggi, pemerintah, maupun swasta. Untuk itu LPM bisa memulai menetapkan lokasi desa binaan baru sebagai proyek percontohan dengan mengacu kepada pokok-pokok pikiran ini.

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atau realisasi pemecahan masalah. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan tahap kegiatan yang telah disusun dengan melibatkan para penyuluh seperti telah diuraikan di atas. Untuk tahap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rasanya tidak menjadi problem besar dan mampu dilakukan.

#### IV. Simpulan

Dari uraian di atas ada beberapa yang dapat disimpulkan:

*Pertama*, LPM UIN Sunan Kalijaga harus segera mengkaji ulang metode pelaksanaan Desa Binaan yang sesuai dengan paradigma integratif-interkoneksi. Dalam waktu dekat LPM harus mengadakan seminar atau workshop untuk membahas metode pelaksanaan Desa Binaan yang tepat untuk UIN.

*Kedua*, Sambil menunggu metode yang akan ditetapkan, sementara dapat mengacu kepada metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan beberapa catatan. Metode PRA dengan beberapa catatannya dinilai mencerminkan paradigma integratif yang menggabungkan antara kepentingan UIN dengan kepentingan masyarakat di lokasi desa binaan.

*Ketiga*, Dalam satu lokasi desa binaan dosen penyuluh yang ditunjuk harus disesuaikan baik jumlah maupun keahliannya dengan masalah dan rencana pemecahan yang ada di lokasi, kegiatan keagamaan dan non keagamaan. Dosen penyuluh harus merangkul antara yang berlatar pendidikan keagamaan dengan non keagamaan. Kebijakan ini sebagai pencerminan dari paradigma interkoneksi. Dalam merekrut dosen penyuluh sesuai kebutuhan, LPM berkoordinasi dengan Fakultas.

*Keempat*, Semua Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga harus memasukkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan rutin dengan dukungan dana yang memadai. Dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan LPM.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Patiroy, 2006, "Orientasi Pengabdian LPM dalam Bingkai Paradigma Interkoneksi UIN", *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga
- Amin Abdullah, 2006, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- \_\_\_\_\_, 2004, "Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Arah Integratif-interdisiplinary". *Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Panel Refleksi 21 Tahun Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 16 Maret 2004*.
- Anonim, 2004, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga
- Atho Mudzhar, 2000, "Kedudukan IAIN sebagai Perguruan Tinggi" dalam Komarudin Hidayat, *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta :Ditperta Departemen Agama Depag RI, 1998/1999, *Pedoman Pelaksanaan Desa Binaan IAIN/STAIN*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia
- Gatot Murdjito, 1996, "Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan", *Makalah disampaikan pada Pembekalan Program Pembangunan Daerah Bagi Dosen Pembimbing Lapangan KKN, diadakan oleh Biro Bina Sosial Setwilda Propinsi DIY, 18 - 19 Juli 1996*.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, 1986, "Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan", *Masyarakat Indonesia XII (2)*
- Margono Slamet, 1993, "Arti dan Metoda Pengabdian pada Masyarakat dan Bentuk-Bentuk Pelaksanaannya oleh Perguruan Tinggi", dalam Agussalim Sitompul (ed.), *Metodologi Pengabdian pada Masyarakat*, Yogyakarta: Balai Pengabdian pada Masyarakat P3M IAIN Sunan Kalijaga
- Supriatna (ed.), 2005, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Panitia Pelaksana KKN, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga
- \_\_\_\_\_, 2006, "Paradigma Interkoneksi dalam Penelitian Hukum Islam, Redesaian Terhadap Metodologi Penelitian dalam Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga

Syafri Mangkupawira, 1993, “Metode Analisis dan Pemecahan Masalah Masyarakat”, dalam Agus Salim Sitompul, *Metodologi Pengabdian pada Masyarakat*, Yogyakarta: Balai Pengabdian pada Masyarakat P3M IAIN Sunan Kalijaga

Taufiq A. Dardiri dan Zainal Abidin, 2006, “Menata Ulang Paradigma Pengabdian kepada Masyarakat, Refleksi Perubahan PPM Menjadi LPM UIN Sunan Kalijaga”, dalam *Jurnal Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. VII No. 1, Juni 2006.

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

